

Penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur

Veronika Boleng Kelen, Indriyati, Yosef Dionisius Lamawuran, Juventur Jimi Lam

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia

Penulis korespondensi : Veronika Boleng Kelen

E-mail : veronikakelen5@gmail.com

Diterima: 03 Februari 2026 | Direvisi: 25 Februari 2027 | Disetujui: 27 Februari 2026 | Online: 27 Februari 2026

© Penulis 2026

Abstrak

Pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel merupakan fondasi utama bagi terwujudnya pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan. Desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur, masih menghadapi permasalahan rendahnya transparansi pengelolaan pemerintahan desa serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, khususnya pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparatur desa dan meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat melalui penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu persiapan, sosialisasi, pelatihan dan bimbingan. Mitra kegiatan meliputi aparatur desa dan masyarakat Desa Ile Padung dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam diskusi dan penyusunan rencana aksi desa, serta tersusunnya rencana aksi tata kelola desa yang berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas. Kegiatan ini berkontribusi positif dalam memperkuat kepercayaan masyarakat serta mendorong terwujudnya pemerintahan desa yang lebih terbuka dan partisipatif.

Kata kunci: tata kelola desa; transparansi; akuntabilitas; partisipasi masyarakat

Abstract

Transparent and accountable village governance is a fundamental prerequisite for participatory and sustainable rural development. Ile Padung Village, Lewolema District, East Flores Regency, continues to face challenges related to limited transparency in village governance and low community participation in development planning processes, particularly during Village Development Planning Meetings (Musrenbang). This community service program aims to strengthen the capacity of village officials and enhance community participation through the implementation of transparent, accountable, and participatory village governance. The activities were conducted through three stages: socialization, training, and mentoring. The program involved village officials and community representatives, with a total of 45 participants. The results indicate increased understanding of good governance principles, improved community participation in discussions and action plan formulation, and the development of a village governance action plan emphasizing transparency and accountability. This program contributes to strengthening public trust and fostering more open and participatory village governance.

Keywords: village governance; transparency; accountability; community participation.

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan lokal yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan Masyarakat (Handini et al., 2025). Sebagai unit pemerintahan terdepan, desa diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya, merencanakan pembangunan, serta memberikan pelayanan publik kepada Masyarakat (Nabilah & Fikriana, 2023). Oleh karena itu, penerapan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel menjadi prasyarat penting untuk menjamin efektivitas pembangunan desa serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Sholihin, 2024).

Tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan informasi, tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program Pembangunan (Goo & Sanda, 2022). Transparansi memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi kebijakan dan anggaran desa, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa setiap kebijakan dan penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun social (Sari & Widyawati, 2021). Berbagai studi menunjukkan bahwa tata kelola yang baik berkontribusi terhadap meningkatnya partisipasi masyarakat dan efektivitas pembangunan di tingkat desa (Adisiswanto, 2025).

Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak desa yang menghadapi kendala dalam mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif (Ramadhani et al., 2026). Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa (Nurwanda & Nursetiawan, 2025). Kondisi lain oleh (Halid & Amaliah, 2025) menjelaskan bahwa umumnya dipengaruhi oleh keterbatasan akses informasi, lemahnya komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, serta rendahnya kapasitas aparatur desa dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik.

Permasalahan tersebut juga terjadi di Desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur. Berdasarkan hasil identifikasi awal, partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) masih tergolong rendah. Banyak warga tidak hadir atau kurang aktif menyampaikan aspirasi dalam forum musyawarah, sehingga kebutuhan dan prioritas masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi dalam perencanaan pembangunan desa. Akibatnya, beberapa program pembangunan yang dilaksanakan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Rendahnya partisipasi masyarakat tersebut tidak terlepas dari minimnya transparansi informasi serta keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam mengelola pemerintahan secara terbuka dan akuntabel (Safrilia & Wijaya, 2025). Informasi terkait perencanaan program, pengelolaan anggaran, dan hasil pelaksanaan kegiatan desa belum tersosialisasi secara optimal kepada masyarakat. Kondisi ini mendorong munculnya sikap apatis masyarakat terhadap kebijakan pemerintah desa dan melemahkan fungsi pengawasan publik (Setiawan, 2024). Selain itu, masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan peran mereka dalam pembangunan desa turut menjadi faktor penghambat partisipasi (Heri, 2024). Masyarakat cenderung memposisikan diri sebagai objek pembangunan, bukan sebagai subjek yang memiliki peran penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa (Sunarso, 2023). Apabila kondisi ini dibiarkan, maka pembangunan desa berpotensi tidak berkelanjutan dan kurang memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan upaya penguatan tata kelola pemerintahan desa yang berfokus pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang sebagai bentuk pendampingan dan pemberdayaan aparatur desa serta masyarakat Desa Ile Padung melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan desa.

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan Desa Ile Padung yang transparan dan akuntabel guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur, selama dua hari, yaitu pada tanggal 8–9 Januari 2026, bertempat di Balai Desa Ile Padung. Kegiatan dilaksanakan oleh tim pengabdian dosen dan mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Mitra kegiatan pengabdian meliputi Pemerintah Desa Ile Padung, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemangku Adat (LPA), ketua-ketua RT, kader desa, serta ibu-ibu PKK, dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang yang mewakili berbagai unsur masyarakat desa. Metode pelaksanaan kegiatan dirancang dalam tiga tahapan utama, yaitu persiapan, sosialisasi, dan pelatihan. Berikut penjelasan masing-masing tahapan dalam kegiatan pengabdian ini:

1. Tahap persiapan: Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan koordinasi awal dengan Pemerintah Desa Ile Padung guna memperoleh gambaran umum mengenai kondisi tata kelola pemerintahan desa serta tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Koordinasi ini juga bertujuan untuk menyepakati waktu, lokasi, peserta kegiatan dan hal-hal teknis lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Tahap sosialisasi: tahap ini dilaksanakan pada hari pertama melalui penyampaian materi mengenai konsep dan praktik tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel berbasis prinsip *agile governance*. Materi mencakup prinsip partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, dan akuntabilitas. Sebelum kegiatan sosialisasi dimulai, peserta diminta mengisi instrumen pre-test untuk mengukur tingkat pengetahuan awal dan sikap peserta terkait tata kelola pemerintahan desa.
3. Tahap pelatihan dan pendampingan: dilaksanakan pada hari kedua dengan fokus pada pendampingan internal aparatur desa, khususnya terkait penguatan keterbukaan informasi melalui pemanfaatan teknologi digital. Kegiatan bimbingan diarahkan pada pengembangan dan optimalisasi website desa serta media sosial desa sebagai sarana transparansi publik. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pengisian instrumen post-test, observasi partisipasi peserta, dan diskusi reflektif untuk menilai peningkatan pemahaman dan komitmen peserta terhadap penerapan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan di Desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur selama dua hari, yaitu pada tanggal 8–9 Januari 2026, bertempat di Balai Desa Ile Padung. Kegiatan ini melibatkan aparatur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemangku Adat (LPA), ketua RT dari masing-masing dusun, kader desa, serta ibu-ibu PKK sebagai representasi masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada penguatan pemahaman dan kapasitas aparatur desa serta masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Sosialisasi Tata Kelola Pemerintahan Desa

Hari pertama kegiatan diawali dengan sosialisasi mengenai konsep dan praktik tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel berbasis *agile governance*. Sebelum pemaparan materi, peserta terlebih dahulu diminta mengisi instrumen pengukuran awal (*pre-test*) untuk mengetahui tingkat pemahaman dan sikap peserta terhadap tata kelola pemerintahan desa. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Desa Ile Padung, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Ketua Tim Pengabdian.

Penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur

Materi sosialisasi mencakup prinsip-prinsip utama tata kelola pemerintahan desa, antara lain partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, dan akuntabilitas. Peserta diberikan pemahaman bahwa pembangunan desa tidak dapat dilaksanakan secara sepihak oleh pemerintah desa, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Selain itu, disampaikan pula pentingnya keterbukaan informasi publik dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sesuai dengan regulasi yang berlaku.



Gambar 1. Penyampaian Materi Sosialisasi Kepada Peserta

Peran Praktisi dan Identifikasi Permasalahan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan sosialisasi diperkuat dengan kehadiran Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Flores Timur sebagai praktisi birokrasi. Dalam pemaparannya, Kepala Dinas PMD membagikan pengalaman empiris terkait penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa di berbagai wilayah serta langkah-langkah konkret yang dapat diterapkan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Permasalahan rendahnya partisipasi masyarakat di Desa Ile Padung dikaitkan dengan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban dan peran mereka sebagai subjek pembangunan desa. Pernyataan ini diperkuat oleh Kepala Desa Ile Padung yang mengungkapkan bahwa tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sangat rendah. Dari sekitar 300 kepala keluarga yang ada, hanya sebagian kecil yang aktif menghadiri forum musyawarah. Selain itu, masyarakat cenderung enggan menyampaikan aspirasi secara langsung dalam forum resmi dan lebih memilih menyampaikan keluhan di luar forum, sehingga menyulitkan pemerintah desa dalam mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.



Gambar 2. Pemberian Materi Sosialisasi Oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur

Evaluasi Pemahaman Peserta

Sebagai bentuk evaluasi, peserta diminta mengisi instrumen post-test setelah kegiatan sosialisasi dan diskusi selesai. Hasil analisis pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai konsep tata kelola pemerintahan desa, akuntabilitas pemerintah desa, serta peran masyarakat dalam pembangunan desa. Peningkatan pemahaman ini menjadi indikator keberhasilan kegiatan sosialisasi dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pemerintahan desa yang transparan dan partisipatif.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Kegiatan

Aspek yang Dinilai	Sebelum Sosialisasi (%)	Setelah Sosialisasi (%)	Peningkatan (%)
Pemahaman konsep tata kelola pemerintahan desa	58	82	+24
Pemahaman prinsip transparansi dan akuntabilitas	55	80	+25
Kesadaran hak masyarakat atas informasi dana desa	62	85	+23
Komitmen partisipasi dalam musyawarah desa	60	83	+23
Rata-rata peningkatan seluruh aspek	58,75	82,5	+23,75

Sumber: Data Olahan Kuesioner Pre-Test dan Post-Test

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan sikap peserta setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. Pada aspek pemahaman konsep tata kelola pemerintahan desa terjadi peningkatan dari 58% menjadi 82%, atau naik sebesar 24 poin persentase. Peningkatan serupa terlihat pada pemahaman prinsip transparansi dan akuntabilitas yang meningkat sebesar 25 poin persentase.

Kesadaran peserta terhadap hak masyarakat atas informasi dana desa meningkat sebesar 23 poin persentase, sementara komitmen untuk berpartisipasi dalam musyawarah desa meningkat sebesar 23 poin persentase. Secara keseluruhan, rata-rata peningkatan seluruh aspek mencapai 23,75 poin persentase. Hasil ini menunjukkan bahwa pelatihan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap peningkatan kapasitas peserta, meskipun belum mencapai tingkat maksimal, yang menunjukkan masih adanya ruang untuk penguatan berkelanjutan.



Gambar 3. Peserta Diarahkan Untuk Mengisi Instrumen Pengukuran

Secara keseluruhan hasil sosialisasi menunjukkan bahwa sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta belum memahami secara utuh konsep tata kelola pemerintahan desa, khususnya terkait transparansi dan akuntabilitas. Tata kelola selama ini lebih dipahami sebagai tanggung jawab administratif pemerintah desa semata, tanpa melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur

Setelah sosialisasi, terjadi peningkatan pemahaman peserta mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik.

Pelatihan Pengelolaan Website dan Media Informasi Desa

Hari kedua kegiatan difokuskan pada pelatihan bagi aparatur pemerintah desa terkait pengelolaan website dan media informasi desa sebagai sarana transparansi publik. Hasil penelusuran awal menunjukkan bahwa website Desa Ile Padung telah terdaftar, namun tidak dikelola secara aktif dan belum dimanfaatkan sebagai media penyebaran informasi desa. Konten dasar seperti profil desa, visi dan misi, struktur organisasi, serta data kependudukan belum tersedia, sehingga akses informasi publik menjadi sangat terbatas.

Melalui kegiatan pelatihan, pemerintah desa didorong untuk menyiapkan kelengkapan administrasi desa dan mengaktifkan kembali website desa. Meskipun rencana awal pembuatan barcode akses website belum dapat direalisasikan, kegiatan tetap dilanjutkan dengan pelatihan pengembangan fitur website dan pengelolaan konten informasi desa. Aparatur desa memberikan respons positif dan menyatakan komitmen untuk mengaktifkan kembali website desa serta mengembangkan media informasi desa secara berkelanjutan.



Gambar 4. Proses Pelatihan dan pendampingan Pengelolaan Website Desa

Evaluasi Akhir

Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel melalui pendekatan sosialisasi, diskusi partisipatif, dan pelatihan teknis mampu meningkatkan pemahaman serta kesadaran aparatur desa dan masyarakat. Peningkatan pemahaman ini berimplikasi pada tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan membuka ruang partisipasi yang lebih luas dalam pembangunan desa.



Gambar 6. Foto Penutupan Bersama Tim Pengabdian Dengan Pemerintah Desa

Penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur

Temuan ini menegaskan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat tidak semata-mata disebabkan oleh sikap apatis, tetapi juga oleh keterbatasan informasi dan lemahnya komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur desa dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi strategi penting dalam membangun pemerintahan desa yang responsif dan partisipatif. Akhir kegiatan diperkuat dengan komitmen untuk merancang rencana tindak lanjut pemerintah desa untuk melaksanakan pelatihan lanjutan bagi seluruh aparatur desa, tidak hanya operator website, guna mengatasi keterbatasan sumber daya manusia. Sikap terbuka dan kesadaran pemerintah desa terhadap kelemahan internal ini menjadi modal penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel.

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Ile Padung telah mencapai target utama, yaitu penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Evaluasi pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya perubahan positif baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kualitatif, aparatur desa dan masyarakat mulai memahami bahwa transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif pemerintah desa, melainkan fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik dan mendorong keterlibatan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Masyarakat menunjukkan peningkatan keberanian dalam menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran dalam forum diskusi, yang mengindikasikan tumbuhnya kesadaran partisipatif dan akuntabilitas sosial. Secara kuantitatif, hasil perbandingan instrumen pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan tingkat pengetahuan peserta mengenai prinsip tata kelola pemerintahan desa, peran masyarakat dalam pembangunan, serta pentingnya keterbukaan informasi publik.

Capaian lain yang signifikan adalah munculnya komitmen pemerintah desa untuk memperbaiki praktik keterbukaan informasi, khususnya melalui pemanfaatan website desa dan media informasi digital sebagai sarana transparansi publik. Komitmen ini menjadi modal awal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih responsif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Secara ilmiah, temuan kegiatan ini menguatkan pandangan bahwa peningkatan kapasitas aparatur desa yang disertai dengan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan edukatif dan partisipatif merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa. Model pengabdian ini memiliki potensi untuk diterapkan dan direplikasi di desa lain yang memiliki permasalahan serupa, terutama desa dengan tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah.

Meskipun demikian, terdapat sejumlah hambatan yang perlu mendapat perhatian, antara lain keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa, rendahnya literasi digital, serta budaya apatis sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya hilang. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah desa secara konsisten menindaklanjuti hasil pengabdian ini dengan memperkuat kapasitas aparatur desa, mengaktifkan dan mengelola sistem informasi desa secara berkelanjutan, serta menciptakan berbagai ruang partisipasi alternatif bagi masyarakat. Untuk pengabdian selanjutnya, diperlukan pendampingan lanjutan yang lebih intensif dan kolaboratif antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan pemerintah desa agar penerapan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur, atas dukungan, keterbukaan, dan fasilitasi yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh peserta kegiatan, yang terdiri atas aparatur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemangku Adat (LPA), ketua RT, kader desa,

serta ibu-ibu PKK, yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan kontribusi nyata dalam setiap rangkaian kegiatan.

Penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur atas keterlibatan langsung serta dukungan pemikiran dan pengalaman praktis dalam memperkuat pemahaman tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, khususnya melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atas dukungan moral, administratif, dan pendanaan sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga sinergi dan kerja sama yang telah terjalin antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dapat terus berlanjut serta memberikan manfaat berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif di Desa Ile Padung.

DAFTAR RUJUKAN

- Adiswanto, A. E. (2025). Optimalisasi Tata Kelola Pajak Desa melalui Pendampingan Administrasi Keuangan Berbasis Transparansi dan Partisipasi Masyarakat. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 188–197.
- Goo, E. E. K., & Sanda, E. M. (2022). Analisis pelaksanaan tata kelola rencana strategis, akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap pengelolaan keuangan desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). *Accounting UNIPA-Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Halid, F., & Amaliah, T. H. (2025). Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Desa: Sintesis Tematik Literatur. *Sebi: Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(2), 199–208.
- Handini, N., Darwina, M., & Pangestoeti, W. (2025). Peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui inovasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(5), 964–986.
- Heri, A. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 1376–1388.
- Nabilah, E., & Fikriana, A. (2023). Perbandingan Kewenangan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 56–65.
- Nurwanda, A., & Nursetiawan, I. (2025). Partisipasi Masyarakat Pada Musyawarah Rencana Pembangunan Fisik Di Desa Mekarmukti Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 3(5), 741–756.
- Ramadhani, D., Soraya, D., Febriyanti, S., Astuti, M. P., Pramudita, R., Astuti, P. D., Nefindia, R. R., Syafira, R. F., Tabina, S., & Mentari, A. (2026). TATA KELOLA DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAHAN DESA. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 4(1), 43–55.
- Safrilia, A., & Wijaya, A. R. C. (2025). Eksistensi Pemerintah Desa Cipurut dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Good Governance dalam Transparansi Anggaran Dana Desa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *INTEGRASI: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 3(02), 122–138.
- Sari, V. K., & Widyawati, D. (2021). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(7).
- Setiawan, I. (2024). *Pengawasan pemerintahan dalam ulasan teori dan praktek*. CV. Rtujuh Media Printing.
- Sholihin, S. (2024). Implementasi Prinsip Good Governance di Pemerintahan Desa Subi Kabupaten Natuna dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 5(2), 82–99.
- Sunarso, B. (2023). *Sosiologi Pembangunan Desa*. Uwais Inspirasi Indonesia.

Penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur